



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

**Judul** : Mengapa Pemerintah RI Menilai Grok Elon Musk Bermasalah?  
**Tanggal** : Senin, 12 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : -

Ketakutan terhadap penyalahgunaan fitur Grok AI pada platform X untuk memproduksi konten rekayasa asusila merebak. Bagaimana respons pemerintah?

Oleh Caecilia Mediana

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memutus sementara akses Grok AI. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam pernyataan resmi, Sabtu (10/1/2026), di Jakarta, mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial.

Sehari berselang, Pemerintah Malaysia mengambil langkah yang sama dengan alasan senada. Seberapa berbahaya sebenarnya rekayasa citra dengan bantuan akal imitasi alias deepfake.

Apa yang bisa dipelajari dari artikel ini?

Seberapa parah akal imitasi disalahgunakan untuk rekayasa citra pornografi?

Ketakutan terkait penyalahgunaan teknologi akal imitasi (AI) untuk rekayasa citra pornografi merebak sejak tahun lalu di berbagai belahan dunia. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah citra rekayasa Taylor Swift. Gambar palsu Swift itu dilihat sampai 47 juta kali di salah satu akun media sosial.

Tidak cuma selebritas, para politikus juga jadi sasaran. American Sunlight Project (ASP) mengidentifikasi lebih dari 35.000 konten deepfake yang menggambarkan 26 anggota Kongres Amerika Serikat—25 di antaranya perempuan—dalam situs-situs pornografi. Konten itu bukan sungguhan, melainkan hasil rekayasa menggunakan AI.

Di Inggris, Wakil Perdana Menteri Angela Rayner termasuk di antara lebih dari 30 perempuan politisi Inggris yang ditemukan dalam situs porno deepfake. Situs ini tampaknya menggunakan teknologi AI untuk "menelanjangi" sekitar selusin politikus, lalu mengubah foto-foto mereka menjadi gambar tanpa busana.

Di Korea Selatan, ketakutan pada deepfake pornografi merebak ketika seorang lulusan Seoul National University bersama tiga laki-laki lain membuat gambar dan video deepfake seksual yang eksplisit. Gambar itu mereka bagikan di Telegram. Lebih dari 61 korban teridentifikasi, termasuk 12 alumni dari kampus yang sama dengan pelaku.

Kasus serupa terjadi di Indonesia. Chiko Radityatama Agung Putra, mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri di Semarang, memproduksi konten pornografi dengan mengedit foto guru, siswa, dan alumni sekolahnya, yakni SMAN 11 Semarang, menggunakan AI. Konten itu kemudian diunggah di media sosialnya.

Ketakutan terkait deepfake pornografi makin menguat belakangan ini ketika diketahui akal imitasi Grok (Grok AI) yang menempel pada aplikasi X (Twitter) dengan mudah bisa dipakai untuk kejahatan yang sama.

Bagaimana Grok AI bisa dipakai untuk merekayasa konten pornografi?

Terlepas dari manfaat Grok AI untuk mendapatkan informasi, sejumlah lembaga menemukan chatbot akal imitasi itu memiliki sisi gelap ketika disalahgunakan. Internet Watch Foundation (IWF) yang berbasis di Inggris menemukan pengguna forum dark web telah menggunakan fitur Grok AI untuk membuat gambar pornografi dari remaja perempuan berusia 11 dan 13 tahun.

Gambar-gambar tersebut dianggap sebagai materi pelecehan seksual anak (CSAM) berdasarkan hukum Inggris.

Investigasi Reuters menyebutkan, dalam rentang 10 menit pada Jumat (2/1/2026), terdapat 102 upaya manipulasi foto menggunakan fitur AI Grok agar orang lain tampak mengenakan bikini. Kebanyakan yang dimanipulasi adalah foto perempuan muda dan anak-anak.

Reuters menuliskan, fitur AI Grok kerap mematuhi permintaan tersebut hingga menghasilkan gambar orang berpakaian sangat minim, transparan, atau bahkan hampir tanpa busana.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Alexander Sabar, Rabu (7/1/2026), menegaskan, sejauh ini belum ada pengaturan spesifik dalam Grok AI untuk mencegah pemanfaatan teknologi ini dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis foto pribadi. Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga.

Pernyataan tersebut menindaklanjuti ramainya dugaan penyalahgunaan fitur Grok AI pada platform X untuk memproduksi dan menyebarluaskan konten asusila.

Seberapa merusak dampak produksi konten pornografi palsu dengan Grok AI?

Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja, Jumat (9/1/2026), berpendapat, kemampuan AI Grok untuk memanipulasi foto menjadi konten vulgar bukan hanya masalah privasi individual, melainkan juga ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional.

"Bayangkan jika teknologi ini disalahgunakan untuk memanipulasi foto pejabat negara, tokoh agama, atau figur publik lainnya. Dampaknya bisa memicu konflik horizontal, menurunkan kepercayaan publik, hingga destabilisasi politik," ujarnya.

Korban manipulasi foto menggunakan teknologi AI generatif tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Dampak sosial dari penyebaran konten manipulatif juga sangat merusak tatanan masyarakat.

Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiatives, Wahyudi Djafar, mengatakan, manipulasi digital terhadap foto pribadi bukan sekadar masalah kesusilaan. Perilaku itu juga sebagai bentuk perampasan kendali individu atas identitas visual yang bisa menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan reputasi.

Menurut Wahyudi, upaya paling menantang dari kasus penyalahgunaan fitur AI Grok untuk produksi konten asusila ialah siapa pihak yang paling bertanggung jawab dan tunduk pada aturan hukum Indonesia. Apakah Grok, X, atau warganet yang membuat perintah agar fitur AI Grok mengubah citra perempuan berpakaian lengkap menjadi tanpa busana dalam hitungan detik?

Sejak awal, Elon Musk, menurut Wahyudi, mengizinkan adanya konten pornografi di X. Sementara pengembang chatbot AI lainnya berupaya mengembangkan inovasi yang beretika dan bertanggung jawab.

Bagaimana respons pemerintah di dunia terhadap penyalahgunaan Grok AI?

Sejumlah negara telah merespons bahaya fitur AI Grok. Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mengumumkan pemblokiran Grok pada Minggu (11/1/2026). Pemblokiran berlaku segera setelah pengumuman disampaikan. Alasannya, Grok mengizinkan manipulasi citra untuk pornografi.

Di Eropa, otoritas Perancis mulai menginvestigasi penyebaran deepfake yang eksplisit secara "seksual" dari Grok. Sementara itu, Dewan Hak Sipil Irlandia dan Hak Digital Irlandia mendesak kepolisian nasional Irlandia untuk menyelidiki konten tanpa busana secara massal di X.

Di Inggris, Juru Bicara Resmi Perdana Menteri mengatakan, X perlu segera menangani masalah ini. Regulator Ofcom mendapat dukungan penuh dari perdana menteri untuk mengambil tindakan penegakan hukum di mana pun perusahaan gagal melindungi pengguna di Inggris.

Kantor Komisioner Informasi (ICO) mengatakan telah menghubungi X dan xAI untuk meminta kejelasan tentang langkah-langkah yang perusahaan itu terapkan untuk mematuhi hukum perlindungan data Inggris dan melindungi hak-hak individu. Setiap warga negara, kata ICO, memiliki hak untuk menggunakan media sosial dengan mengetahui data pribadi mereka ditangani secara sah dan hormat.

Bagaimana sikap Pemerintah RI terhadap penyalahgunaan Grok AI?

Pemerintah Indonesia melalui Kemenkomdigi mengambil sikap tegas dengan memutus sementara akses Grok AI. Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam pernyataan resmi, Sabtu (10/1/2026), di Jakarta, menegaskan, pihaknya memutus akses sementara terhadap aplikasi Grok demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial.

Pemerintah Indonesia memandang praktik pemalsuan menggunakan teknologi akal imitasi atau deepfake seksual yang nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital.

Tindakan pemutusan akses dilakukan berdasarkan kewenangan Kemenkomdigi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Peraturan ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Selain memutus sementara akses terhadap aplikasi Grok AI, Kemenkomdigi telah meminta manajemen platform X untuk segera hadir. Mereka harus memberikan klarifikasi dampak negatif penyalahgunaan fitur Grok.

Langkah apa yang bisa dilakukan korban manipulasi deepfake?

Masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto, deepfake asusila, ataupun pelanggaran hak citra diri dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, pelaporan kepada aparat penegak hukum dan pengaduan kepada Kemenkomdigi.

Peneliti jender, hak asasi manusia, dan kebijakan teknologi di PurpleCode Collective, Alia Yofira Karunian, berpendapat, penggunaan Grok AI di X untuk memproduksi foto intim nonkonsensual merupakan pelanggaran privasi perempuan. Dalam kerangka hukum Indonesia, tindakan ini merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis sistem elektronik (KSBE) yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Selain UU TPKS, terdapat pula beragam ketentuan hukum yang dapat ditegakkan pemerintah terhadap X ataupun pengguna yang menyalahgunakan Grok AI. Misalnya, UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Pelindungan Data Pribadi.